DMKP
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2023

Siswa Tanpa Pencerahan: Kurangnya Informasi dan Tingginya Tren Pernikahan Anak di Jawa Timur

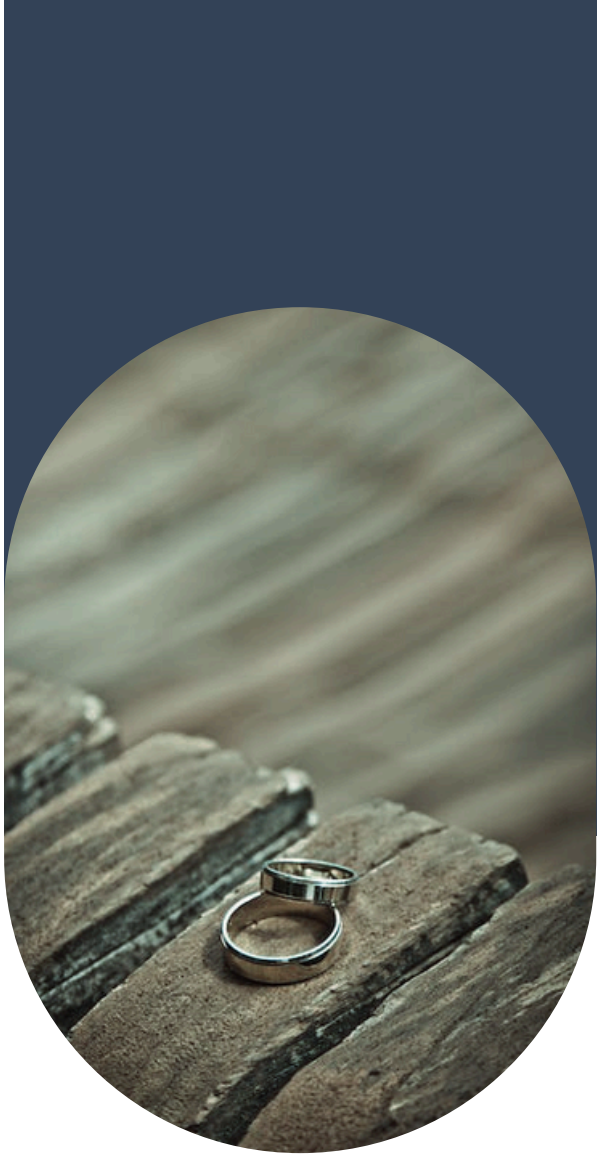

PROPOSED BY :

Shafira Rizq
Ageng Pramesthi K.
Desinta Wahyu K.

EXECUTIVE SUMMARY

Tingginya pengajuan dispensasi kawin di Jawa Timur menunjukkan angka kasus pernikahan anak yang mengkhawatirkan sekaligus menjadi perhatian di Jawa Timur. Pasalnya, pernikahan anak merupakan faktor terjadinya risiko *stunting* serta permasalahan lain, seperti meningkatnya angka putus sekolah, hingga peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Berbagai program dicanangkan oleh BKKBN Jawa Timur, salah satunya adalah Program Generasi Berencana (GenRe) yang diharapkan menjadi media getok tular, yaitu penyebaran informasi dari kader remaja kepada remaja lainnya mengenai bahaya pernikahan anak, perilaku seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun membaca tren angka pernikahan anak di Jawa Timur tiga tahun terakhir ini, yang mencapai belasan ribu kasus, dapat disimpulkan bahwa program BKKBN saat ini perlu dievaluasi lebih lanjut.

BKKBN Jawa Timur perlu tegas dalam mengimplementasikan program-programnya, terutama dalam strategi komunikasi yang dilakukan. Pentingnya penyusunan *standard operational procedure* (SOP) yang jelas dan transparan agar arah kebijakan bukan hanya sekadar nama tanpa dampak nyata. Penggunaan media sosial sepatutnya digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya pernikahan anak, seks bebas, dan narkoba; bukan hanya berisi publikasi agenda kegiatan harian.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2023, publik dikejutkan oleh kabar bahwa ratusan pelajar di Ponorogo mengajukan dispensasi kawin. Meskipun telah diklarifikasi bahwa bukan "pelajar aktif", melainkan anak-anak usia pelajar, hal ini tetap menunjukkan fakta adanya permasalahan serius terkait pernikahan anak di daerah tersebut[1]. Rupanya kasus yang terungkap di Ponorogo hanya merupakan puncak gunung es dari fenomena yang terjadi lebih luas di wilayah Jawa Timur.

Permintaan dispensasi kawin[2] di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 1). Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang permohonan dispensasi kawin terbanyak di Indonesia. Per Juni 2022, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menerima 15.339 permohonan dispensasi kawin dari Jawa Timur sekaligus merupakan 29,4 % dari kasus nasional. Tiga kabupaten dengan permohonan dispensasi kawin tertinggi adalah Kabupaten Malang (1.434 kasus), Kabupaten Jember (1.357 kasus), dan Probolinggo (1.136 kasus)[3]. Melihat tingginya permohonan dispensasi kawin tersebut menunjukkan banyaknya banyaknya kasus pernikahan anak di Provinsi Jawa Timur.

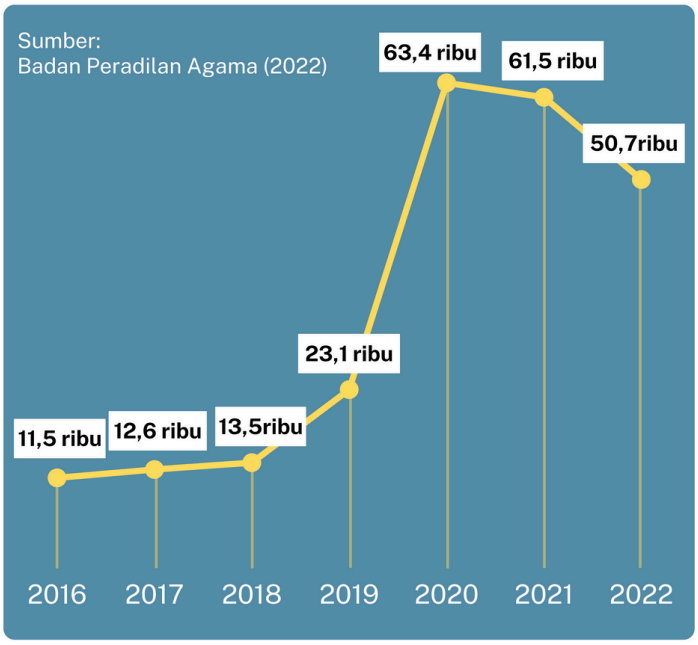

Gambar 1. Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2016-2022

Pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak, dalam hal ini perhatian utama penulis adalah pada risiko *stunting*.[4] Kendati prevalensi stunting balita selama tahun 2007 hingga tahun 2019 telah mengalami penurunan, namun percepatan penurunan stunting masih harus terus diupayakan hingga 14 persen di tahun 2024. Dampak lainnya yang saling berkaitan di antaranya adalah ketimpangan gender, berbagai permasalahan sosial, permasalahan gizi dan kesehatan, perekonomian bangsa dan terhambatnya berbagai program pemerintah lainnya[5].

---

1 Usia minimal kawin menurut undang-undang atau peraturan pemerintah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2 Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun, Ketentuan mengenai izin kawin ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA Surabaya.

4 *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat faktor gizi, infeksi, dan stimulasi yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun (WHO).

5 Disampaikan oleh Dr. Tin Herawati, SP, M.Si dalam Stakeholder Forum #3 dengan Tema "Membedah Strategi Komunikasi Pencegahan Pernikahan Dini: Risiko Stunting Membayangi Jawa Timur" pada tanggal 18 Mei 2023

BKKBN Jawa Timur telah mencanangkan berbagai program untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak dan *stunting* di Jawa Timur. Strategi komunikasi telah dilakukan untuk mendorong program-program tersebut. Akan tetapi keberhasilan strategi komunikasi belum dapat tercerminkan dengan masih tingginya jumlah pernikahan anak di Provinsi Jawa Timur. Strategi komunikasi berperan penting dalam menyampaikan pesan dan manfaat kebijakan atau program pemerintah kepada masyarakat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mendukung program tersebut serta mengubah perilaku mereka sesuai dengan tujuan program. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, program dapat gagal mencapai sasaran dan tujuannya.

Analisis Permasalahan

Jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, menunjukan tingginya kasus pernikahan anak di Provinsi Jawa Timur yang dengan mayoritas penyebabnya adalah hamil diluar nikah. Sepanjang tahun 2022 terdapat 15.337 kasus pengajuan dispensasi kawin yang delapan puluh persennya diakibatkan hamil di luar nikah atau *married by accident*[6]. Dr. Tin Herawati, Kepala Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen mengatakan bahwa salah satu alasan terjadinya kejadian ini adalah karena konten seksual yang dikonsumsi oleh anak-anak berumur dibawah 17 tahun melalui internet dan sosial media[7]. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses informasi terkait pemahaman remaja mengenai dampak hubungan seksual. Banyaknya pemuda yang masih mempunyai miskonsepsi terkait periode subur, risiko kehamilan, serta beranggapan bahwa hanya dengan satu kali hubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan (Widyastari et al., 2015).

Salah satu alasan lainnya adalah tekanan ekonomi yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anaknya meski masih di bawah umur untuk terlepas dari tanggung jawab keuangan (Judiasih et al., 2020). Terdapat stigma bahwa anak perempuan adalah jaminan untuk menyelamatkan keluarga dari krisis keuangan sehingga dianggap bisa dijodohkan oleh orang tuanya[8].

Ketidaksetaraan gender merugikan anak perempuan karena tradisi dan sistem sosial yang menempatkan mereka pada posisi lebih rendah daripada laki-laki, sehingga terdapat stigma bahwa perempuan sebaiknya menikah daripada melanjutkan pendidikan. Selain itu, kalangan masyarakat sering menganggap pernikahan sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina. Orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada membiarkan mereka berpacaran dalam waktu lama.

---

6 https://www.bkkbn.go.id/berita-80-persen-pernikahan-dini-di-jawa-timur-terjadi-akibat-kecelakaan

7 Disampaikan oleh Dr. Tin Herawati, SP., M.Si. dalam Stakeholder Forum berjudul Membedah Strategi Komunikasi Pencegahan Pernikahan Dini: Risiko Stunting Membayangi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada 17 Mei 2023

8 Disampaikan oleh Dra. Maria Ernawati, MM. dalam Stakeholder Forum berjudul Membedah Strategi Komunikasi Pencegahan Pernikahan Dini: Risiko Stunting Membayangi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada 17 Mei 2023

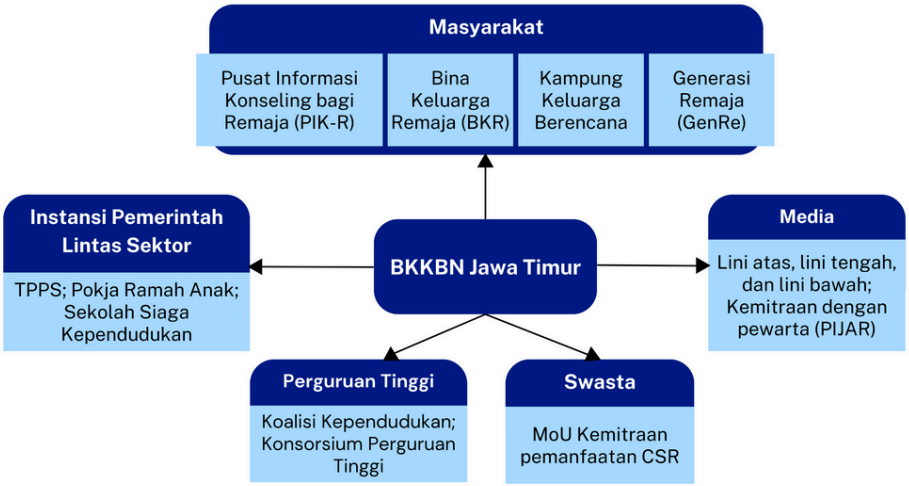

Gambar 2. Program Kolaborasi BKKBN Jawa Timur

Sederet kegiatan yang telah dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur tersebut, ternyata belum mampu mengatasi permasalahan pernikahan anak. Berdasarkan mini research yang telah dilakukan oleh tim peneliti, hanya dua dari sembilan anak yang diwawancarai pernah membaca pamflet bahaya pernikahan dini yang dikeluarkan oleh BKKBN[9]. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam strategi komunikasi program yang telah dijalankan, mengingat pernikahan anak di Jawa Timur adalah isu yang kompleks.

Gambar 2 menunjukkan program-program yang telah digagas oleh BKKBN Jawa Timur, salah satu program yang bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia agar memiliki perencanaan yang matang tentang kehidupan adalah program Generasi Berencana (GenRe). Program tersebut merekrut kader remaja dan kemudian dibentuk sebagai suatu komunitas yang bertugas melakukan kampanye kepada remaja lainnya agar terhindar dari perilaku seks bebas, pernikahan dini, dan ketergantungan pada narkoba.

Duta GenRe yang terpilih mempunyai programnya masing-masing terkait dengan sasaran utama mereka (terkait pencegahan seks, pernikahan anak dan narkoba). Namun hasil penelusuran yang dilakukan secara daring, Duta GenRe belum mempunyai panduan/SOP terkait dengan strategi komunikasi yang akan mereka lakukan dalam rangka mencapai tujuan program GenRe. Selain itu sosial media @genre_jatim juga tidak banyak menunjukkan kampanye dan edukasi, tapi lebih kepada poster terkait dengan acara dan kegiatan yang diadakan tanpa disertai kesimpulan lanjutan terkait dengan acara/kegiatan dimaksud.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat tantangan dalam menjalankan strategi komunikasi untuk menghadapi isu pernikahan anak di Jawa Timur, seperti keberagaman budaya, gaya komunikasi, dan kecepatan dan ketepatan dalam mengisi ruang publik. Keragaman budaya berimplikasi pada gaya komunikasi yang berbeda-beda di setiap daerah serta penggunaan media yang beragam sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Selain itu, gaya komunikasi pada tingkatan usia juga sangat variatif, sehingga diperlukan pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kecepatan dan ketepatan dalam mengisi ruang publik harus dapat direncanakan dengan baik, agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan secara tepat baik

9 Disampaikan oleh Dr. Tin Herawati, SP., M.Si. dalam Stakeholder Forum berjudul Membedah Strategi Komunikasi Pencegahan Pernikahan Dini: Risiko Stunting Membayangi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada 17 Mei 2023

penyampaian melalui teknologi ataupun secara langsung kepada masyarakat. Pentingnya proses komunikasi yang mempertimbangkan kondisi aktual secara keseluruhan dapat diwujudkan salah satunya dengan memperhatikan dimensi informasi seperti komposisi pengguna yang dituju, tujuan dari penggunaan informasi hingga cakupan informasi yang digunakan.

BKKBN Jawa Timur menggunakan media Tiktok, Instagram, Youtube, Facebook (*Fanbase*), Twitter, dan website untuk menyampaikan informasi terkait isu-isu yang menjadi kewenangan BKKBN.

Menurut BKKBN Jawa Timur, penyebaran informasi melalui sosial media telah dilakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Namun berdasarkan hasil telaah yang dilakukan penulis terhadap media tersebut, berdasarkan kuantitas, informasi mengenai dampak pernikahan anak belum banyak dibahas. Dari Tiktok @bkkbnjatimofficial, diketahui bahwa dari 129 video, tidak ada video yang memberikan edukasi mengenai risiko dari pernikahan anak.

Agenda Kebijakan

01 **BKKBN Jawa Timur perlu menyusun SOP terkait dengan panduan konten informasi yang disampaikan oleh Duta GenRe serta memperluas sasaran target komunikasi Program Duta GenRe.**

- Panduan disusun agar informasi dapat disampaikan secara terarah meskipun dalam kanal media yang beragam, sehingga strategi komunikasi dapat memberikan efek yang sama meskipun dengan media yang beragam baik secara luring maupun daring.
- Panduan tidak hanya berisi konten utama GenRe (Seks Pranikah, Pernikahan Anak dan Narkoba), namun termasuk konten pendukung seperti pengetahuan terkait dengan kesehatan, nutrisi, keuangan dan memberi keyakinan bahwa peningkatan peluang kerja remaja akan meningkatkan status ekonomi keluarga.
- Penyesuaian konten disusun spesifik sesuai gender, seperti penekanan informasi kepada laki-laki terkait dengan dampak hubungan seksual dan kesehatan reproduksi, serta konten berisi pemberdayaan perempuan dengan tujuan mengajak remaja perempuan untuk turut terlibat sebagai *income generation* dan meningkatkan Ekonomi Keluarga.
- Harmonisasi sosial media Duta Genre dengan akun sosial media BKKBN dalam rangka memperkuat kampanye dan edukasi dalam menghadapi pernikahan anak.
- Perluasan sasaran strategi komunikasi melalui *community-based program* yang ditujukan kepada lingkungan masyarakat dan orang tua melalui kerja sama lintas program dengan Bina Keluarga Remaja (BKR). Melihat bahwa keputusan pernikahan seringkali masih berada di tangan keluarga atau

bahkan kepala komunitas sehingga dibutuhkan pendekatan komplementer yang ditujukan kepada orang tua, keluarga hingga anggota komunitas, dalam rangka mengubah norma sosial dan menghilangkan stigma 'pernikahan anak' sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi (Roest, 2016).

02 Penyesuaian strategi komunikasi oleh BKKBN Jawa Timur berdasarkan karakteristik di daerah

- Keragaman Budaya serta Gaya Komunikasi merupakan tantangan dalam menjalankan strategi komunikasi yang ada di Prov. Jawa Timur, sehingga perlunya diversitas kanal informasi yang beragam. Perbedaan dari masing-masing daerah harus dapat dipahami dalam hal budaya, kondisi sosial-ekonomi, dinamika masyarakat serta faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran (Gage, 2013). BKKBN dapat menggunakan media baru yang dikemas semenarik mungkin, seperti penggunaan games sehingga dapat melakukan pendekatan terhadap remaja.
- Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kemajuan teknologi, mereka dengan kelas ekonomi menengah ke bawah biasanya tidak terlalu banyak terpapar teknologi, sehingga susah untuk menggaet mereka apabila hanya bergantung dengan komunikasi yang dilakukan melalui teknologi.
- Dalam menyusun strategi komunikasi perlu dilakukan analisis terkait dengan demografis sasaran komunikasi yang dituju sehingga komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Untuk daerah dimana mayoritas masyarakat adalah keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, penting untuk dapat mengoptimalkan metode tatap muka secara *door-to-door,* hingga sosialisasi rutin dan dengan memperhatikan kearifan lokal.

03 *Re-branding* kanal media BKKBN Jawa Timur.

- Memaksimalkan peran sosial media sebagai ruang edukasi, bukan sebagai ruang untuk laporan kegiatan.
- Media sosial dimanfaatkan sebagai alat edukasi kepada masyarakat, bukan digunakan sebagai galeri agenda kantor, sehingga harapannya masyarakat akan lebih tertarik untuk mengakses informasi yang diberikan terkait program yang berada dibawah kewenangan BKKBN, termasuk di dalamnya terkait pernikahan anak.

Referensi

- Gage, A. J. (2013). Child marriage prevention in Amhara Region, Ethiopia: Association of communication exposure and social influence with parents/guardians' knowledge and attitudes. Social Science & Medicine, 97, 124–133. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.017
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 203-222. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221
- Roest, J. (2016). Child Marriage and Early Child-bearing in India: Young Lives.
- Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., & Shaluhiyah, Z. (2015). "Women Won't Get Pregnant with one Sexual Intercourse" Misconceptions in Reproductive Health Knowledge among Indonesian Young Men. Journal of Health Research, 29(1), 63069.